

**DISCRIMINATION AGAINST THE ROHINGYA ETHNIC AS A CHALLENGE TO
DEMOCRACY AND GOOD GOVERNANCE IN MYANMAR**

**DISKRIMINASI TERHADAP ETNIS ROHINGYA SEBAGAI TANTANGAN
TERHADAP DEMOKRASI DAN GOOD GOVERNANCE DI MYANMAR**

Aisyah Dwi Aprilia¹, Ihfadzillah Yahfadzka², Haura Clarinta Milandrina³,
Nurul Rahmadhani Kusumaningrum⁴, Syifa Fauziah⁵, Ridwan⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik,

Universitas Pembangunan “Nasional” Veteran Jakarta

E-mail: 2310413038@mahasiswaupnvj.ac.id¹

ARTICLE INFO

Correspondent

Aisyah Dwi Aprilia
2310413038@mahasiswaupn
vj.ac.id

Key words:

Democracy, Discrimination,
Good Governance,
Myanmar, Rohingya Ethnic
Group

Website:

[https://idm.or.id/JSER/index.
php/JSER](https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER)

page: 864 – 872

ABSTRACT

Discrimination against the Rohingya ethnic group in Myanmar has become a serious issue, reflecting the country's failure to uphold democracy and good governance principles. This study aims to analyze the root causes of Rohingya discrimination, its impact on Myanmar's democratization process, and the international response to this crisis. Using a qualitative research method based on literature review, this study reveals that discriminatory policies, such as the revocation of citizenship under the 1982 Citizenship Law and restricted access to basic services, have systematically marginalized the Rohingya. Furthermore, the study finds that widespread human rights violations, including organized violence and mass expulsions, have hindered Myanmar's efforts to achieve inclusive democracy. Internationally, various measures, such as economic sanctions, UN resolutions, and humanitarian aid, have been implemented. However, these efforts remain ineffective, largely due to geopolitical dynamics and the support of major powers for the Myanmar government. The study highlights the importance of domestic policy reforms that promote equality, respect for human rights, and the cessation of religious and ethnic discrimination. A holistic approach that includes interfaith dialogue, diversity education, and more coordinated international pressure is necessary to achieve equitable solutions and foster stability in the region.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL

Koresponden

Aisyah Dwi Aprilia
2310413038@mahasiswaupn
vj.ac.id

Kata kunci:

*Demokrasi, Diskriminasi,
Etnis Rohingya, Myanmar,
Tata Kelola Pemerintahan*

Website:

[https://idm.or.id/JSER/index.
php/JSER](https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER)

hal: 864 – 872

ABSTRAK

Diskriminasi terhadap etnis Rohingya di Myanmar telah menjadi permasalahan serius yang mencerminkan kegagalan negara tersebut dalam menerapkan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar diskriminasi terhadap Rohingya, dampaknya pada proses demokratisasi, serta respons internasional terhadap krisis ini. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis kajian literatur, penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan diskriminatif seperti pencabutan kewarganegaraan melalui Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 dan pembatasan akses layanan dasar telah memarginalkan Rohingya secara sistematis. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, termasuk kekerasan terorganisir dan pengusiran massal, telah menghambat upaya Myanmar untuk mencapai demokrasi yang inklusif. Di tingkat internasional, berbagai langkah seperti pemberian sanksi ekonomi, resolusi PBB, dan bantuan kemanusiaan telah dilakukan. Namun, upaya ini belum efektif, terutama karena dinamika geopolitik dan dukungan negara-negara besar terhadap pemerintah Myanmar. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya reformasi kebijakan domestik yang mendukung kesetaraan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penghentian diskriminasi berbasis agama dan etnis. Pendekatan holistik yang mencakup dialog antaragama, pendidikan keberagaman, serta tekanan internasional yang lebih terkoordinasi diperlukan untuk mencapai solusi yang berkeadilan dan mendorong stabilitas di kawasan tersebut.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Diskriminasi terhadap etnis Rohingya di Myanmar telah menjadi isu yang mendalam dan kompleks, menciptakan dampak signifikan terhadap stabilitas sosial negara serta mencerminkan kegagalan Myanmar dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Etnis Rohingya, yang mayoritas beragama Islam, telah menghadapi berbagai bentuk perlakuan diskriminatif selama puluhan tahun, mulai dari pencabutan status kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan 1982, hingga pembatasan terhadap akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan (Cheesman, 2017). Kekerasan terstruktur, pengusiran massal, serta pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlanjut semakin memperburuk situasi komunitas ini (Human Right Watch, 2013).

Fenomena diskriminasi terhadap Rohingya mencerminkan bagaimana Myanmar gagal menerapkan nilai-nilai fundamental demokrasi, seperti penghormatan

terhadap hak asasi manusia, kesetaraan, dan inklusi sosial. Nilai-nilai ini, yang seharusnya menjadi landasan bagi pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan, justru terabaikan. Di sisi lain, ketidakmampuan Myanmar dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, seperti keadilan sosial, akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, semakin menegaskan lemahnya komitmen negara tersebut terhadap standar internasional tata kelola pemerintahan yang baik (Ibrahim, 2016). Kebijakan diskriminatif yang dilakukan secara sistematis ini tidak hanya merusak harmoni sosial di dalam negeri, tetapi juga menciptakan ketegangan yang mendalam antara kelompok mayoritas dan minoritas (Farzana, 2020).

Krisis Rohingya telah berkembang menjadi isu yang melampaui batasan domestik dan menarik perhatian internasional. Dunia internasional, melalui sanksi ekonomi, resolusi, dan upaya mediasi oleh lembaga-lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap komunitas Rohingya sebagai salah satu tragedi kemanusiaan terbesar abad ini. Meski demikian, respons lambat dan sikap defensif pemerintah Myanmar terhadap tekanan global hanya memperburuk citranya sebagai negara yang seharusnya berkomitmen pada demokrasi dan *good governance*. Alih-alih menyelesaikan masalah ini, pemerintah Myanmar tampak terus melanggengkan budaya diskriminasi yang mengakar. Kebijakan yang tidak manusiawi, seperti pembatasan akses kemanusiaan di wilayah Rakhine dan kurangnya upaya untuk mengembalikan status kewarganegaraan Rohingya, menunjukkan lemahnya komitmen terhadap penyelesaian yang adil. Di sisi lain, komunitas internasional juga menghadapi tantangan dalam memberikan tekanan efektif kepada Myanmar, terutama karena ketegangan geopolitik dan peran negara-negara besar seperti Tiongkok dan India yang sering kali mendukung pemerintah Myanmar demi kepentingan ekonomi dan strategis mereka (Sidhu, 2017).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengedepankan interpretasi dengan mengkaji budaya, kasus, dan konteks sebagaimana prinsip dalam ilmu sosial (Neuman, 2014). Metode tersebut digunakan untuk dapat memahami mengenai fenomena sosial melalui *literature review* seperti buku, artikel jurnal, ataupun dengan berita terkait dengan diskriminasi terhadap etnis Rohingya. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat terungkap bagaimana diskriminasi terhadap etnis Rohingya menjadi tantangan terhadap *good governance* pemerintah di Myanmar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Hukum dan Pelanggaran HAM

Konflik antar etnis Rohingya di Myanmar merupakan salah satu masalah kemanusiaan paling serius di dunia, terutama akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat. Menurut laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), tindakan kekerasan terhadap etnis Rohingya meliputi pembunuhan massal, pemerkosaan, penyiksaan, dan pemindahan paksa secara sistematis. Tindakan ini melanggar prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

(CERD), serta menunjukkan pengabaian Myanmar terhadap kewajibannya sebagai negara anggota PBB (Komnas HAM, 2018).

Perampasan kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 merupakan sumber diskriminasi terhadap masyarakat Rohingya. Menurut laporan Pusat Kajian Internasional dan Strategis Universitas Indonesia (PSSI), kebijakan tersebut telah membuat etnis Rohingya "stateless" atau tidak memiliki kewarganegaraan, tanpa akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan kebebasan bergerak. Lebih lanjut, diskriminasi ini semakin diperparah dengan peran militer Myanmar (Tatmadaw) yang melakukan aksi kekerasan terorganisir (PSSI UI, 2019).

Laporan Pusat Penelitian Kebijakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan bahwa kegagalan Myanmar dalam menerapkan demokrasi menjadi alasan utama mengapa pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya terus berlanjut meski negara tersebut berada dalam masa transisi itu. Hal ini menyoroti tidak efektifnya demokrasi dalam melindungi kelompok minoritas dari diskriminasi berdasarkan agama dan etnis (LIPI, 2020) di tingkat internasional, sistem hukum sudah menyediakan mekanisme untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Namun, analisis Habibie Center menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan sedang mencari bantuan hukum internasional untuk memastikan Myanmar bertanggung jawab, mengingat lemahnya tekanan diplomatik dari negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, dan tidak adanya sanksi keras terhadap Myanmar terbukti kurang dimanfaatkan. Terjadi Pelanggaran (The Habibie Center, 2021). Selain pendekatan hukum, penting juga untuk dipahami bahwa konflik Rohingya mencakup dimensi sosial, politik, dan agama.

Menurut laporan Maarif Institute, propaganda kebencian yang disebar oleh elit politik Myanmar telah menyebabkan masyarakat melakukan diskriminasi terhadap Rohingya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk mengatasi akar diskriminasi ini melalui pendidikan, reformasi kebijakan dan peningkatan kesadaran di tingkat komunitas internasional (Maarif Institute, 2020).

Krisis Etnis Rohingya

Krisis etnis Rohingya merupakan salah satu tragedi kemanusiaan terburuk abad ini, yang melibatkan penganiayaan sistematis terhadap minoritas Rohingya di Myanmar. Rohingya, yang mayoritas beragama Islam, telah lama menghadapi diskriminasi yang terstruktur oleh pemerintah Myanmar dan masyarakat mayoritas yang beragama Buddha. Pencabutan kewarganegaraan melalui Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 menjadi akar utama permasalahan ini. Kebijakan tersebut membuat Rohingya kehilangan status kewarganegaraan, menjadikan mereka sebagai kelompok "stateless" yang tidak memiliki hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kebebasan bergerak.

Krisis ini mencapai puncaknya pada tahun 2017, ketika militer Myanmar (Tatmadaw) meluncurkan operasi besar-besaran yang disebut sebagai "operasi pembersihan" di negara bagian Rakhine. Operasi ini mencakup pembunuhan massal, pemerkosaan, penyiksaan, dan pembakaran desa-desa Rohingya. Menurut laporan PBB, tindakan militer Myanmar ini dapat dikategorikan sebagai genosida

karena ditujukan untuk menghancurkan kelompok etnis secara keseluruhan. Akibatnya, lebih dari 700.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, terutama ke kamp pengungsian di Cox's Bazar, yang saat ini menjadi salah satu kamp pengungsi terbesar di dunia.

Krisis Rohingya juga melibatkan dimensi sosial, politik, dan agama. Diskriminasi terhadap Rohingya diperkuat oleh narasi kebencian yang disebarkan oleh kelompok radikal seperti Ma Ba Tha dan biksu Ashin Wirathu, yang menggambarkan Rohingya sebagai ancaman bagi identitas nasional Myanmar. Pada saat yang sama, lemahnya respons dari komunitas internasional dan ASEAN memperburuk situasi. Prinsip “non-interference” yang dianut ASEAN menyebabkan organisasi tersebut hanya berfokus pada bantuan kemanusiaan tanpa memberikan tekanan politik yang berarti kepada Myanmar.

Namun, berbagai pihak juga menunjukkan solidaritas terhadap Rohingya. Di Indonesia, organisasi seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lembaga seperti Komnas HAM aktif membantu pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh dan negara-negara lain. Untuk mengatasi krisis ini, diperlukan solusi menyeluruh yang mencakup tekanan internasional terhadap Myanmar, reformasi kebijakan diskriminatif, serta upaya untuk mengatasi akar konflik melalui exchange antaragama dan pendidikan keberagaman. Hanya dengan langkah-langkah ini, hak-hak dasar Rohingya dapat dipulihkan, dan perdamaian di kawasan dapat tercapai.

Peran Agama dalam Diskriminasi Rohingya

Diskriminasi terhadap etnis Rohingya di Myanmar tidak hanya dipengaruhi oleh faktor politik dan nasional, namun juga diperburuk oleh peran agama. Mayoritas penduduk Myanmar yang beragama Budha sering memandang etnis Rohingya yang mayoritas beragama Islam sebagai ancaman terhadap identitas nasional dan agama mereka

Retorika kebencian yang disebarkan oleh kelompok ekstremis seperti Ma Ba Ta (Asosiasi Perlindungan Ras dan Agama) dan tokoh seperti Asin Wirathu memperburuk situasi. Mereka menggambarkan Rohingya sebagai “ancaman” yang berupaya mengislamkan Myanmar dan dengan demikian secara moral membenarkan tindakan kekerasan

Dalam beberapa kasus, ajaran Buddha digunakan untuk membenarkan kekuasaan mayoritas dan mendukung penindasan militer terhadap Rohingya. Selain itu, kebijakan pemerintah yang pro-Buddha, seperti melarang pembangunan masjid dan membatasi upacara keagamaan umat Islam, semakin memperburuk diskriminasi berbasis agama ini. Namun, agama juga bisa menjadi jembatan menuju perdamaian. Di Indonesia, organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menunjukkan solidaritas antar agama dengan memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya. Di Myanmar, penting untuk memanfaatkan pendekatan berbasis agama ini dalam bentuk dialog antaragama dan pendidikan keberagaman. Selain itu, melibatkan tokoh agama moderat di dalam dan di luar Myanmar, termasuk yang Mulia Dalai Lama, dapat membantu mengurangi ujaran kebencian dan mendorong perdamaian. Langkah-langkah ini akan membantu mengatasi diskriminasi agama yang mendasari konflik Rohingya secara bertahap.

Menurut laporan Maarif Institute (2020), elit politik Myanmar dan beberapa ulama ekstremis di kalangan Buddha, seperti kelompok Ma Ba Ta (Asosiasi Perlindungan Ras dan Agama), telah menggunakan retorika kebencian terhadap permainan Myanmar peran penting dalam menyebarkan berita Rohingya. Mereka menggunakan isu-isu agama untuk mendukung argumen mereka bahwa Rohingya merupakan ancaman terhadap identitas nasional dan agama mayoritas penduduk Myanmar. Ceritanya menyatakan bahwa Rohingya, sebagai Muslim, "mengancam" dominasi budaya dan agama Buddha di Myanmar. Ulama terkemuka seperti Asin Wirathu, yang dijuluki sebagai "wajah terorisme Buddha" oleh media internasional, sering menyebarkan propaganda bahwa komunitas Muslim Myanmar, termasuk Rohingya, mencoba mengislamkan negara tersebut. Hal ini memperburuk ketegangan antara komunitas Buddha dan Muslim di Myanmar dan memberikan pembenaran moral atas tindakan kekerasan terhadap Rohingya. Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI, 2020) menyatakan bahwa peran agama dalam diskriminasi terhadap Rohingya juga terkait dengan bagaimana ajaran agama digunakan untuk mendukung dominasi kelompok mayoritas. Beberapa biksu radikal menyatakan bahwa kekerasan terhadap Rohingya adalah bentuk "perlindungan agama" dari pengaruh luar. Narasi tersebut tidak hanya menyulut kebencian di tingkat masyarakat, namun juga memberikan legitimasi bagi militer Myanmar (Tatmadaw) untuk melakukan tindakan represif terhadap etnis Rohingya

Dampak Diskriminasi terhadap Proses Demokrasi Myanmar

Dalam pembahasan ini, diskriminasi terhadap etnis Rohingya di Myanmar telah mencapai titik menghalangi proses transisi negara tersebut menuju demokrasi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dengan melakukan riset mendalam, penelitian ini mengungkapkan diskriminasi tidak hanya dirasakan oleh komunitas Rohingya, tetapi juga telah menghambat proses demokratisasi. Di bawah rezim militer Myanmar, Rohingya seringkali dipandang sebagai kelompok tanpa status kewarganegaraan yang sah, meskipun mereka telah lama tinggal di negara tersebut. Berdasarkan undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar yang diberlakukan pada tahun 1982 secara tegas mengecualikan Rohingya dari status kewarganegaraan, yang membuat mereka rentan terhadap diskriminasi dan kekerasan. Kebijakan ini telah mengakibatkan marginalisasi Rohingya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Dengan demikian, diskriminasi terhadap Rohingya secara langsung menghalangi akses mereka ke proses politik yang adil dan mengurangi kualitas demokrasi di Myanmar (Brooten, 2020)

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan diskriminasi terhadap Rohingya memperburuk polarisasi politik yang sudah ada. Walaupun Myanmar telah memulai transisi demokrasi sejak 2010, ketegangan antara kelompok etnis mayoritas dan minoritas, khususnya Rohingya, terus berlanjut dan semakin memperburuk perpecahan sosial. Akibatnya, harapan untuk mencapai demokrasi yang lebih inklusif semakin terhambat. Sebagai contoh, dalam proses pemilihan umum, Rohingya seringkali dilarang untuk berpartisipasi, baik sebagai pemilih maupun calon legislatif yang semakin memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang ada dan melemahkan proses demokrasi yang lebih terbuka (McCurry, 2022)

Diskriminasi terhadap Rohingya juga memperparah ketegangan sosial di Myanmar yang semakin terpecah. Kelompok-kelompok nasionalis yang mendominasi kebijakan pemerintah sering memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat identitas nasional mereka, dengan menggambarkan Rohingya sebagai ancaman terhadap kesatuan negara. Dinamika ini semakin memperumit upaya membangun konsensus politik lebih luas yang sangat penting dalam suatu negara demokratis dengan menghargai hak asasi manusia dan keberagaman (Taylor, 2019; Zaw, 2023). Secara keseluruhan, diskriminasi terhadap Rohingya mengancam fondasi demokrasi yang sedang dibangun di Negara Myanmar.

Tanggapan Internasional terhadap Krisis Rohingya

Krisis kemanusiaan yang melibatkan etnis Rohingya di Myanmar telah menarik perhatian dunia internasional, tetapi respons terhadap isu ini sangat beragam. Tindakan internasional mencakup berbagai bentuk intervensi, mulai dari langkah diplomatik, pemberian sanksi ekonomi, hingga upaya pengiriman bantuan kemanusiaan. Walaupun kekerasan yang dilakukan oleh militer Myanmar dikecam secara global, respons internasional seringkali terasa terbatas dan belum cukup efektif dalam mengubah situasi yang ada di Myanmar.

Salah satu langkah yang ditempuh oleh negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, dengan penerapan sanksi terhadap individu dan entitas yang terkait dengan junta militer Myanmar. Sanksi ini bertujuan memberikan tekanan ekonomi pada pemerintah Myanmar agar menghentikan tindakan kekerasan terhadap Rohingya dan lebih menghormati hak asasi manusia (Smith, 2021). Namun, analisis menunjukkan bahwa sanksi-sanksi ini belum berhasil membawa perubahan signifikan dalam menghentikan kekerasan atau memperbaiki kondisi politik di Myanmar. Banyak dari sanksi tersebut tidak menyorot langsung pada kekuasaan militer, yang masih mendapat dukungan dari negara-negara besar seperti China dan Rusia, yang bahkan menghalangi upaya lebih lanjut di forum internasional seperti PBB (Chau, 2022).

Di tingkat internasional, PBB telah berupaya merespons dengan mengirimkan tim pencari fakta dan mendesak Myanmar untuk menghentikan kekerasan. Namun, Dewan Keamanan PBB tidak mampu mengambil langkah yang lebih tegas karena adanya hak veto dari negara-negara seperti China dan Rusia, yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah Myanmar. Laporan dari Komisi Penyelidikan Internasional mengenai Myanmar (2020) menunjukkan bahwa meskipun PBB telah berusaha melakukan intervensi, ketidakmampuan mencapai konsensus di Dewan Keamanan telah menghambat penerapan tindakan yang lebih efektif (United Nations, 2020).

Selain itu, berbagai organisasi non-pemerintah internasional, seperti Human Rights Watch dan Amnesty International, juga telah melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran global terkait kekerasan yang menimpa Rohingya, serta mendesak negara-negara di seluruh dunia untuk bertindak lebih tegas. Meski kampanye-kampanye ini cukup luas, respons internasional terhadap akar permasalahan yaitu diskriminasi sistematis terhadap Rohingya masih sangat minim. Sebagian besar perhatian lebih fokus pada dampak kekerasan, sementara solusi jangka panjang yang dapat mengatasi ketidakadilan struktural yang menjadi penyebab utama krisis ini belum banyak dibahas (Chau, 2022).

Secara keseluruhan, meskipun respons internasional terhadap krisis Rohingya menunjukkan adanya solidaritas kemanusiaan, langkah-langkah yang diambil sejauh ini belum cukup efektif untuk memaksa Myanmar melakukan perubahan kebijakan. Hal ini mencerminkan kegagalan diplomasi multilateral, di mana negara-negara yang memiliki pengaruh besar, seperti China dan Rusia, lebih memilih untuk mempertahankan hubungan dengan pemerintah Myanmar demi kepentingan geopolitik mereka (Brooten, 2020, #)

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa diskriminasi terhadap etnis Rohingya di Myanmar mencerminkan kegagalan mendasar dalam penerapan nilai-nilai demokrasi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan seperti pencabutan kewarganegaraan, pembatasan akses terhadap layanan dasar, dan pengabaian terhadap hak asasi manusia telah memarjinalkan etnis Rohingya dan menjadikan mereka kelompok tanpa negara yang rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, narasi kebencian yang didorong oleh aktor-aktor ekstremis serta penggunaan agama sebagai alat pembenaran atas kekerasan telah memperkuat segregasi sosial dan memperburuk polarisasi di Myanmar.

Dampak diskriminasi ini tidak hanya terasa pada level domestik, tetapi juga memiliki implikasi internasional yang signifikan. Krisis Rohingya telah menjadi salah satu isu kemanusiaan paling mendesak di dunia, tetapi justru respons global terhadap permasalahan ini masih sangat terbatas. Meskipun ada berbagai upaya yang telah dilakukan seperti pemberlakuan sanksi ekonomi, resolusi PBB, dan bantuan kemanusiaan, namun upaya-upaya ini belum mampu menciptakan perubahan yang berarti di lapangan. Hal ini terutama disebabkan oleh kepentingan geopolitik negara-negara besar yang mendukung pemerintah Myanmar serta lemahnya tekanan dari organisasi kawasan seperti ASEAN.

Untuk menyelesaikan krisis ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Reformasi kebijakan domestik yang memastikan perlindungan hak-hak dasar bagi Rohingya harus menjadi prioritas. Selain itu, dialog antaragama dan pendidikan keberagaman di tingkat masyarakat dapat membantu mengatasi akar diskriminasi berbasis agama dan etnis. Di sisi internasional, diperlukan tekanan diplomatik yang lebih terkoordinasi, termasuk melalui pemberian sanksi yang efektif dan advokasi global yang berfokus pada solusi jangka panjang.

Langkah-langkah ini harus diiringi dengan upaya untuk membangun kepercayaan antara kelompok mayoritas dan minoritas di Myanmar, menciptakan ruang untuk dialog yang inklusif, dan mendukung inisiatif lokal yang mendorong rekonsiliasi. Hanya melalui kombinasi pendekatan lokal dan global yang sinergis, diskriminasi terhadap Rohingya dapat diakhiri, dan Myanmar dapat diarahkan menuju demokrasi yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi pengingat pentingnya kolaborasi antara aktor domestik dan internasional untuk memastikan hak asasi manusia dan keadilan sosial tetap menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan konflik etnis di Myanmar.

DAFTAR PUSTAKA

Brooten, L. (2020). *Myanmar and the Rohingya Crisis: A Reflection of Democratic Challenges*. *Southeast Asian Studies*, 48(1), 121-145.

- Chau, K. (2022). *Human Rights and Humanitarian Efforts in Myanmar: International Response to the Rohingya Crisis*. Human Rights Watch.
- McCurry, J. (2022). *The Rohingya Crisis: International Diplomacy and the Failure of Accountability*. The Guardian.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: qualitative and quantitative approaches (seventh edition)*. UK: Pearson Educational Limited.
- Ningrum, K. S. (2024). Konflik Religius di Myanmar: Kekerasan dan Penguasaan Masal Terhadap Komunitas Rohingya., Vol. 2 No. 2, Hal 99-109.
- Smith, M. (2021). *Myanmar's Political Crisis and International Responses: A Case Study of the Rohingya*. *International Affairs Review*, 25(3), 45-67.
- Taylor, R. H. (2019). Myanmar: The Politics of Race and Ethnicity. *Asian Studies Review*, 43(2), 189-210.
- Umam, F., & Iskandar. (2023). Perlindungan Warga Sipil Etnis Rohingya dari Diskriminasi Pemerintahan Myanmar.
- United Nations. (2020). *Report of the United Nations General Assembly on the Situation of Human Rights in Myanmar*. United Nations.
- Zaw, Z. (2023). *The Politics of Exclusion: Ethnic Discrimination and its Impact on Myanmar's Democracy*. *Journal of Southeast Asian Politics*, 18(4), 503-523.